

LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019

NAMA : AHMAD MUJAHID, SH
NIP : 19800712 201001 1 014
PANGKAT / GOL : Penata / (III/c)
JABATAN : Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Triwulan : IV Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bawah tugas Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan evaluasi penagihan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
- b. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah ditetapkan;
- c. mencatat dan membukukan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. melakukan penerimaan denda dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah.
- e. membuat laporan rekapitulasi hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkala;
- f. membuat daftar piutang pajak dan retribusi daerah;
- g. melakukan rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah dengan SKPD pemungut pajak dan retribusi daerah
- h. Melakukan intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan Keuangan Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi lain menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan kinerja menurut Sri Ningsih (2002) kinerja mungkin berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politik atau birokratis. Kinerja mungkin juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya : kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar proses yang ditetapkan. Kinerja mungkin juga berfokus pada jumlah output suatu program atau kegiatan, misalnya jumlah produk atau jasa yang telah diberikan atau disediakan bagi kolega, klien dan publik atau masyarakat.

Khusus dalam laporan ini yang dibahas adalah akuntabilitas kinerja individu yang menggambarkan kinerja jabatan Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan IV Tahun 2019 yang terdiri dari perjanjian kinerja, capaian kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja yang akan diuraikan dihalaman berikut ini

KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA : Triwulan : IV

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Menyusun Rencana Kerja APBD Murni dan APBD Perubahan	Jumlah dokumen Renja Awal Yang Disusun	Dokumen	-			
2	Rekonsiliasi Penerimaan	Jumlah SKPD yang Mengikuti Rekon	SKPD	72			
3	Penagihan/Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Objek Tagihan	Objek	343			
4	Perhitungan Insentif Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Perhitungan Insentif	Kali	1			
5	Pelaksanaan Kegiatan Anugerah Pajak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kali	1			
6	Rekon Pajak Penerangan Jalan	Jumlah Pelaksanaan Rekon	Kali	-			
7	Menyusun Laporan PAD & Data Piutang Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	3			

B. Capaian Kinerja 2019
Triwulan : IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Menyusun Rencana Kerja APBD Murni dan APBD Perubahan	Jumlah dokumen Renja Awal Yang Disusun	Dokumen	-	-	-					
2	Rekonsiliasi Penerimaan	Jumlah SKPD yang Mengikuti Rekon	SKPD	72	72	100					
3	Penagihan/Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Objek Tagihan	Objek	343	343	100					
4.	Perhitungan Insentif Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Perhitungan Insentif	Kali	1	1	100					
5	Pelaksanaan Kegiatan Anugerah Pajak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kali	1	1	100					
6	Rekon Pajak Penerangan Jalan	Jumlah Pelaksanaan Rekon	Kali	-	-	-					
7	Menyusun Laporan PAD & Data Piutang Pajak Daerah & Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Dokumen	3	3	100					
	Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2019					100					

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan IV 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari 7 (tujuh) Sasaran dan 7 (tujuh) indikator sasaran dapat mencapai 100% atau sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Menyusun Rencana Kerja APBD Murni & APBD Perubahan, Capaian Kinerja 0%.
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Renja Awal Yang Disusun, 0%
2. Sasaran : Rekonsiliasi Penerimaan, Capaian Kinerja 100%
Indikator Kinerja:
 - Jumlah SKPD Yang Mengikuti Rekon Tercapai (100%)
3. Sasaran : Penagihan/Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Capaian Kinerja 100%
Indikator kinerja :
 - Jumlah Objek Tagihan, Tercapai (100 %)
4. Sasaran : Perhitungan Insentif Pajak Daerah & Retribusi Daerah , Capaian Kinerja 100%.
Indikator Kinerja :
 - Jumlah Perhitungan Insentif, Tercapai (100%)

5. Sasaran : Pelaksanaan Kegiatan Anugerah Pajak , Capaian Kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan, tercapai 100%

6. Sasaran : Rekon Pajak Penerangan Jalan, Capaian Kinerja 0%

Indikator Kinerja :

- Jumlah Pelaksanaan Rekon Pajak Penerangan Jalan, Tercapai 0%

7. Sasaran : Menyusun Laporan PAD & Data Piutang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Capaian Kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah Dokumen Laporan, Tercapai 100%

D. Rencana Tindak Lanjut

Semua sasaran kinerja Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan Keuangan Daerah triwulan IV tahun 2019 dapat tercapai 100%, hal ini karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar Kasubbid dan staf Bidang PAD dan Dana Perimbangan serta bidang - bidang lain lingkup Badan Keuangan Daerah. Koordinasi dan kerjasama yang baik ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk pencapaian sasaran organisasi Badan Keuangan secara keseluruhan.

E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada).

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan :

Pada triwulan IV tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran Kepala Sub Bidang Penagihan & Pelaporan PAD Badan Keuangan Daerah tercapai 100% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. SDM staf/pelaksana yang masih kurang cakap dalam menggunakan komputer/IT.
2. SDM staf/pelaksana yang masih kurang cakap dalam menyusun rencana kerja.
3. Budaya kerja dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya belum berjalan maksimal.

C. Saran/masukan

1. Mendorong agar budaya kerja disiplin dan tanggung jawab lebih ditingkatkan guna mencapai hasil yang diharapkan.
2. Pemberlakuan e-kinerja dapat dijadikan alat monitoring kinerja bawahan.

Tanggal, 31 Desember 2019

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kabid PAD & Dana Perimbangan,



H. FAJAR ABDI, ST

Pembina

NIP. 19760611 200003 1 004

Kasubbid Penagihan & Pelaporan PAD,



AHMAD MUJAHID, SH

Penata

NIP. 19800712 201001 1 014



LAPORAN KINERJA INDIVIDU

TRIWULAN IV TAHUN 2019

NAMA : AHMAD MUJAHID, SH

NIP. 19800712 201001 1 014

JABATAN :

**KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN
DAN PELAPORAN PAD**

BADAN KEUANGAN DAERAH